



Analisis Perbedaan Regulasi Pangan pada Pasar Ekspor: Studi Kasus Penarikan Produk Mi Instan Indonesia di Beberapa Negara

Rindu Aprillia¹, Halimah Zahrah², Wulan Nur Aszad³, Zahra Fauziahsari⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 01-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

This study examines how differences in food safety regulations in Indonesia, Taiwan, and Malaysia impacted the recall of Indomie Special Chicken Flavor products in Taiwan and Malaysia. The main issue revealed is that regulatory differences led to the recall of the product, even though it met applicable Indonesian food safety standards and Codex Alimentarius standards. This study aims to identify the factors contributing to the recall and provide strategic recommendations to industry stakeholders. Employing descriptive qualitative methods and literature analysis, this study investigates the product recall caused by ethylene oxide (EtO) levels exceeding limits set by Taiwanese and Malaysian authorities. The results indicate that differences in export destination country regulations are a key factor in product recalls, requiring producers to understand and comply with local regulations more thoroughly. Additionally, the study emphasizes the importance of business ethics and transparent crisis communication strategies for maintaining corporate reputation and consumer trust. These findings offer strategic recommendations to industry stakeholders and policymakers for managing regulatory compliance and risk mitigation to ensure the sustainability of Indonesian food exports to global markets. Thus, this study contributes to a better understanding of international regulatory dynamics and their implications for the food industry.

Keywords: Food Regulation; Product Withdrawal; Ekspor.

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti dampak dari perbedaan regulasi keamanan pangan di Indonesia, Taiwan, dan Malaysia terhadap penarikan produk Indomie rasa ayam spesial di Taiwan dan Malaysia. Permasalahan utama yang terungkap adalah adanya perbedaan dalam regulasi yang menyebabkan penarikan barang meskipun produk tersebut sudah memenuhi norma keamanan pangan yang berlaku di Indonesia dan juga standar Codex Alimentarius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penarikan produk dan memberikan saran strategis kepada para pelaku industri. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dan analisis literatur untuk menginvestigasi kasus penarikan produk yang diakibatkan oleh kandungan etilen oksida (EtO) yang melebihi batas yang ditetapkan oleh otoritas Taiwan maupun Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan regulasi di negara tujuan ekspor muncul sebagai faktor kunci dalam penarikan produk, yang mengharuskan produsen untuk memahami dan menaati regulasi lokal dengan lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab etika bisnis serta strategi komunikasi krisis yang terbuka untuk menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan dari konsumen. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku

industri dan pembuat kebijakan dalam mengelola kepatuhan terhadap regulasi serta mitigasi risiko demi keberlanjutan ekspor produk pangan Indonesia ke pasar global. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika regulasi internasional dan implikasinya terhadap industri pangan.

Katakunci: Regulasi Pangan; Penarikan Produk; Ekspor.

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat, tidak terkecuali dalam menyiapkan makanan. Salah satu makanan alternatif yang digemari masyarakat adalah mi instan. Mi instan memiliki rasa yang lezat serta proses penyajian yang mudah dan cepat, harganya yang murah membuat mie instan berpotensi sebagai salah satu bahan makanan pilihan selain beras (Lubis, 2010).

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang memiliki produk mi instan terbesar di Indonesia yang berhasil menembus pasar global. Indomie merupakan merek mi instan yang sangat populer kalangan pecinta mi baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Indomie berhasil menembus pasar global dengan berbagai cara baik dengan memperluas jaringan distribusi, lokalisasi produk dan bekerja sama serta memberikan lisensi kepada perusahaan lokal. Indomie berhasil melakukan strategi pemasaran tersebut sehingga dapat dikenal oleh konsumen negara ekspor.

Ekspansi global tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan standar regulasi keamanan pangan yang berbeda di setiap yurisdiksi. Walaupun sudah berhasil menembus pasar global belum lama ini negara taiwan menarik produk indomie rasa ayam spesial dari pasaran karena ditemukan zat etilen oksida (EtO) yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Selain taiwan, malaysia juga menarik produk tersebut di edaran karena kandungan EtO nya melebihi batas maksimum.

Kejadian tersebut menjadi perhatian besar bagi para konsumen dan industri pangan, selain itu kejadian ini juga memunculkan perbedaan standar keamanan pangan antar negara. Meskipun sudah ada standar keamanan global, setiap negara juga memiliki standar keamanan masing masing yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang akan masuk ke pasar negara tersebut. Sehingga perbedaan tersebut merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh perusahaan sebelum memasarkan suatu produk di pasar global.

Teori etika bisnis dan regulasi makanan global memainkan peran penting dalam memahami dinamika indomie rasa ayam spesial di taiwan, malaysia dan indonesia. Dalam teori etika bisnis, yang menekankan tanggung jawab moral perusahaan kepada konsumen dan publik, produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka sediakan aman dan berkualitas. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi ekspektasi etis dan sosial dari pemangku kepentingan (Caroll, 1991). Dalam konteks ini, penarikan produk Indomie mencerminkan upaya perusahaan untuk memenuhi standar etika dan menjaga kepercayaan konsumen. Di sisi lain, regulasi pangan global, seperti yang diatur oleh organisasi internasional seperti Codex Alimentarius, menetapkan standar keamanan dan kualitas pangan yang harus dipatuhi oleh produsen di seluruh dunia (Codex Alimentarius, 2025).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perbedaan regulasi Taiwan, Malaysia dan Indonesia mempengaruhi keputusan penarikan produk serta dampaknya terhadap persepsi konsumen. Penelitian terdahulu menunjukkan strategi komunikasi yang diterapkan perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen, termasuk kerja sama dengan lembaga pengawas dan penyampaian informasi yang transparan (Awalia & Komsiah, 2024).

Menganalisis pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam konteks regulasi pangan dan pasar ekspor, dengan fokus pada studi kasus penarikan produk Indomie di Taiwan dan Malaysia. penarikan Indomie rasa ayam spesial di Taiwan terhadap persepsi konsumen dan untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengelola etika produksi dan kepatuhan terhadap regulasi di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan regulasi pangan di Indonesia, Malaysia dan Taiwan. Serta bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keputusan penarikan produk (CNBC Indonesia, 2023).

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran etika bisnis dalam konteks regulasi pangan dan pasar ekspor, dengan studi kasus penarikan produk Indomie di Taiwan dan Malaysia. Konsep utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan regulasi pangan di kedua negara mempengaruhi keputusan dalam melakukan penarikan produk, serta dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab etis perusahaan dalam menjaga kualitas produk yang dipasarkan di luar negeri.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak, pantas dari perilaku seseorang berbisnis, berwirausaha atau bekerja. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis tidak hanya mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang berlaku, terutama dalam kegiatan produksi dan distribusi produk makanan (Halifah, 2015).

Etika bisnis dalam perdagangan internasional adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku bisnis dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. Perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi kedua belah negara jika terdapat perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara tersebut. Selain itu, jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ekspor harus lebih kecil dibandingkan untuk memproduksi barang impor. Maka negara optimis akan diberikan manfaat dari perdagangan internasional yang dilakukan (Dewi Fatmala, 2023).

Keamanan pangan merupakan salah satu isu krusial dalam sektor kesehatan masyarakat (public health). Tidak hanya menjadi sumber masalah kesehatan yang paling besar, keamanan pangan juga menjadi salah satu penyumbang penurunan produktivitas ekonomi. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan manusia dan menekan laju pertumbuhan angka penyakit serta risiko kematian, lembaga internasional, seperti WHO, FAO, dan WTO telah menyusun berbagai standar yang dapat menjadi tolak ukur bagi masing-masing negara untuk membuat kebijakan keamanan pangan yang efektif. Salah satu standar pangan internasional yang juga berperan menjadi rujukan dalam sengketa perdagangan WTO serta dalam penyusunan perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional, maupun multilateral, adalah Codex Alimentarius berbahaya (Codex) yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission (CAC), organisasi internasional yang dibentuk oleh World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO). Menurut WHO (World Health Organization) ada lima kunci untuk penyediaan pangan yang aman yaitu: Menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan pangan matang, memasak pangan dengan benar, menyimpan pangan dalam suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang

aman yaitu yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu air harus bebas mikroba dan bahan kimia yang dapat membahayakan Kesehatan (Rinitami Njatrijani, 2021). Di sisi lain, berdasarkan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures WTO* (Kesepakatan SPS), setiap negara memiliki hak untuk menentukan tingkat keamanan pangan, kesehatan hewan dan tumbuhan yang dianggap tepat berdasarkan penilaian risiko. Penggunaan Etilen Oksida (EtO) sebagai antimikroba/perlindungan produk tanaman diperbolehkan di beberapa negara dan Codex Alimentarius tidak menetapkan batas maksimum residu untuk senyawa ini. Namun, di banyak negara lainnya, termasuk UE, Amerika Serikat, Kanada, Taiwan, dan Singapura penggunaannya dibatasi atau bahkan dilarang baik sebagai bahan fumigasi maupun sebagai residu dalam produk pangan (Fuji Anrina, 2023),

Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggungjawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga tanggung jawab tersebut mencakup: tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Terdapat tiga tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab, yaitu:

1. Tahapan pandangan manajemen klasik. Pandangan ini muncul pada abad XIX dengan Milton Freudman sebagai pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin mencapai tingkat laba yang akan memuaskan pemiliknya. Dalam hal ini, tidak diperhatikan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial tersebut.
2. Tahapan pandangan Manajemen Pertengahan. Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an, dengan anggapan bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan maksimalisasi laba. Manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemilik perusahaan dengan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok dan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya, untuk tujuan maksimalisasi laba di masa mendatang.
3. Tahapan pandangan Manajemen Modern. Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dan bukannya merupakan tujuan itu sendiri. Harus terdapat pemenuhan kebutuhan yang sesuai, misal pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak, pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu yang baik, pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal yang lebih besar dan tingkat deviden yang tinggi dan sebagainya, di dalam kerangka yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosial.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung maupun tidak langsung harus mau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sesungguhnya sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat. Oleh karenanya perusahaan seharusnya memberikan laporan kepada masyarakat umum tentang sumber-sumber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai dan semua yang diakibatkan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan hal tersebut sesuai dengan perkembangan yang terbaru dalam pandangan manajemen. (Naning Fatmawati, 2017)

Penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap informasi kandungan Zat Etilen Oksida pada mi instan Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam analisis regulasi di negara

yang berbeda, khususnya dalam konteks penarikan produk. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan fokus pada kasus Indomie di Taiwan dan Malaysia. (Nadya Smaralaksmi Et Al, 2022)

Studi ini memberikan kontribusi dengan mengungkap bagaimana perbedaan regulasi pangan dan penerapan standar keamanan di negara tujuan ekspor dapat berdampak signifikan terhadap akses pasar produk pangan Indonesia, khususnya melalui analisis kasus penarikan Indomie di Taiwan dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai peran regulasi sebagai alat proteksionisme yang mempengaruhi dinamika perdagangan internasional produk makanan olahan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan standar keamanan pangan serta mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan ekspor produk pangan Indonesia di pasar global.

Hasil penelitian terdahulu mengenai regulasi pangan dan pasar ekspor telah dikemukakan oleh peneliti. Antara lain artikel yang ditulis Pujio Lamtarida Panggabean Et Al (2016), “regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dan kesenjangannya dengan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN” yang diterbitkan di jurnal mutu pangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dan Kriteria pengawasan impor pangan ASEAN, mengkaji implementasi pengawasan impor Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai studi kasus, dan menyusun rekomendasi. Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur dan analisis deskriptif untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan kriteria ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria ASEAN, terutama terkait sampling berbasis risiko, penanganan situasi darurat, dan keputusan terhadap produk tidak layak. Implementasi pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui revisi regulasi, peningkatan laboratorium, dan kompetensi petugas (Fujio Lamtarida Panggabean Et Al 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perbedaan regulasi pangan yang mempengaruhi penarikan produk Indomie rasa ayam spesial di Taiwan. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara rinci berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti (Moleong, 2007). Menggunakan metode studi literatur, sebuah pendekatan sistematis yang melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendukung pembahasan terkait penarikan Indomie Rasa Ayam Spesial akibat adanya kandungan Etilen Oksida. Proses pencarian literatur dilakukan atas dasar sistematis basis data elektronik seperti artikel jurnal ilmiah dan publikasi berita. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai topik penelitian, sekaligus membangun landasan teoritis yang kuat melalui sintesis berbagai perspektif yang ada (Moleong Lexy J, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan Produk Indomie di Taiwan dan Malaysia

BPOM Taiwan pada 9 Juni 2010, menyatakan bahwa produk mi instan buatan Indofood yang ada di pasaran tidak sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan. Bahwa di dalam indomie terdapat kandungan zat berbahaya seperti *methyl phydroxybenzoate* (E218) dan *benzoic acid* (*nipagin*/ bahan pengawet). Kedua zat tersebut ditemukan dalam saus kecap dan bumbu kering. Saat diserap tubuh, terjadi reaksi alergi dan pada tahapan kronis menyebabkan kanker yang berujung kematian. Surat edaran tanggal tersebut kemudian dipertegas lagi pada 10 Oktober 2010. [*Detik Finance*](#) (11 Oktober 2010), pemerintah Taiwan menyatakan bahwa produk Indomie dilarang masuk dan secara total diberhentikan, termasuk kegiatan jual-belinya. Pihak Indofood dengan cepat membantah klaim tersebut. Sebab, mereka sudah memenuhi standar keamanan internasional yang telah ditentukan *CODEC Alimentarius Commision* (CAC), organisasi yang didirikan oleh FAO dan WHO. Terlebih, tidak ada satupun keluhan dari konsumen di negara lain. Jadi, klaim pemerintah Taiwan tersebut tentu menjadi pertanyaan. Pernyataan resmi BPOM Taiwan tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran pada 10 Oktober 2010, yang berisi larangan tegas terhadap peredaran produk Indomie di seluruh wilayah Taiwan. Pemerintah setempat tidak hanya menghentikan distribusi dan penjualan produk tersebut, namun juga melarang seluruh aktivitas impor Indomie secara total. Tindakan ini diambil sebagai bentuk pencegahan atas risiko kesehatan masyarakat yang mungkin timbul dari konsumsi mi instan yang mengandung bahan yang dianggap berbahaya tersebut.

Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2023, kali ini terjadi di Malaysia. Kementerian kesehatan malaysia, melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKMM), telah menghentikan sementara distribusi Indomie dengan rasa Ayam Spesial setelah pihak berwenang keamanan pangan Taiwan sebelumnya mendeteksi adanya residu etilen oksida dalam jumlah tertentu. Etilen oksida adalah bahan kimia yang umumnya dimanfaatkan sebagai agen sterilisasi untuk rempah dan bahan mentah industri, tetapi penggunaannya dalam produk makanan dilarang atau dibatasi karena dianggap sebagai zat yang dapat menyebabkan kanker menurut Badan Internasional untuk penelitian Kanker (IARC). Meskipun kandungan tersebut berada dalam ambang batas tertentu, Malaysia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem pengawasannya dan melakukan pengujian laboratorium lanjutan. Pihak Indofood kembali menegaskan bahwa produk mereka aman dikonsumsi dan telah melalui proses pengawasan mutu yang ketat sesuai regulasi Indonesia (CNN Indonesia, 2023; Kompas, 2023).

Insiden penarikan produk yang dialami oleh Indomie di Taiwan dan Malaysia menunjukkan bahwa ekspor barang makanan tidak hanya bergantung pada kualitas produksi dalam negeri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang diterapkan di negara tujuan. Dalam ranah perdagangan internasional, isu teknis seperti perbedaan regulasi pangan sering kali berubah menjadi hambatan non-tarif yang dapat mengganggu proses ekspor. Apabila produsen tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tersebut, daya saing produk mereka akan berkurang. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan proses penyesuaian dengan standar internasional dapat dilakukan secara terbuka, konsisten, dan efisien. Upaya ini harus didukung dengan penguatan sistem pengawasan pascapasar serta peningkatan kapasitas laboratorium pengujian agar sejalan dengan standar global. Dengan cara ini, risiko terulangnya penarikan produk di pasar

internasional dapat diminimalkan. Lebih dari sekadar memenuhi persyaratan ekspor, usaha ini juga krusial untuk menjaga citra dan kepercayaan internasional terhadap produk pangan asal Indonesia. Keamanan dan mutu produk yang diakui secara global akan menjadi aset utama untuk memastikan keberlanjutan ekspor serta memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang dapat memproduksi barang pangan yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar internasional.

Perbedaan Regulasi Pangan di Setiap Negara

Kasus penarikan produk Indomie di Taiwan (2010) dan Malaysia (2023) mencerminkan dinamika yang kompleks antara regulasi pangan domestik dan tantangan dalam perdagangan internasional. Meskipun Indomie merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia yang telah diterima luas secara global, kedua insiden tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh popularitas produk, tetapi juga oleh kemampuan produsen dalam memenuhi standar keamanan pangan negara tujuan. Kasus di Taiwan melibatkan kandungan zat pengawet yang tidak diizinkan, sementara di Malaysia ditemukan kandungan etilena oksida yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Kedua kasus ini memperjelas bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai keamanan pangan, baik dari sisi ambang batas residu zat kimia maupun daftar bahan yang diperbolehkan. Perbedaan ini seringkali menjadi tantangan bagi eksportir karena mengharuskan mereka untuk melakukan penyesuaian terhadap formulasi produk, proses produksi, hingga pelabelan.

Dalam kasus Taiwan tahun 2010, Otoritas keamanan pangan Taiwan menggunakan metode penentuan 2-Chloro Ethanol (2-CE) untuk mengukur sisa EtO pada sampel bumbu mi instan produk indomie. Mereka menemukan sisa EtO sebesar 0,34 ppm, dan metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah EtO yang digunakan dalam produk yang diuji. Angka itu melebihi atas aman di sana karena Taiwan tidak memperbolehkan EtO terdapat pada pangan. Sama halnya dalam kasus Malaysia (2023), Malaysia Kementerian Kesehatan (KKM) menerapkan langkah serupa seperti di Taiwan, dengan memerintahkan penarikan sementara produk tersebut dari peredaran di 26 April 2023. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menetapkan batas maksimal residu 2-CE sebesar 85 ppm untuk kategori Pasta dan Mi Pra-Masak serta produk sejenis. Dengan demikian, menurut standar BPOM, produk itu aman untuk dikonsumsi di Indonesia.

Sudut pandang regulasi menunjukkan bahwa kedua kejadian tersebut menggambarkan penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) oleh negara-negara pengimpor untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan pangan di wilayah masing-masing. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk menerapkan pembatasan atau pelarangan terhadap produk impor yang dianggap berisiko, meskipun produk tersebut telah memenuhi standar keamanan nasional di negara asal, seperti standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar nasional tidak serta-merta menjamin penerimaan produk di pasar internasional, karena setiap negara memiliki kerangka regulasi dan standar keamanan pangan yang dapat berbeda secara signifikan, baik dari sisi ambang batas zat tertentu, metode pengujian, maupun persyaratan pelabelan dan sertifikasi.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai ekspor makanan, bahwa manajemen kepatuhan atau compliance management merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.

Produsen tidak cukup hanya memastikan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan regulasi domestik, melainkan juga harus secara proaktif melakukan kajian regulasi lintas negara secara sistematis. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap standar teknis, persyaratan sertifikasi, prosedur otorisasi, serta potensi isu non-tarif di negara tujuan. Dalam banyak kasus, produsen perlu melakukan reformulasi produk, penyesuaian kemasan, atau memperoleh sertifikasi tambahan agar dapat memenuhi ketentuan pasar sasaran. Dengan kata lain, keberhasilan ekspor produk makanan sangat bergantung pada kemampuan produsen dalam mengelola risiko regulasi dan menyesuaikan diri secara adaptif terhadap dinamika standar internasional.

Kasus Indomie juga memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana krisis keamanan pangan dapat dengan cepat menjadi sorotan media dan perhatian publik global. Di era digital yang ditandai oleh konektivitas tinggi dan kecepatan arus informasi, kabar mengenai penarikan suatu produk dari peredaran tidak hanya menyebar secara lokal, tetapi dapat menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia dalam hitungan jam—bahkan menit. Situasi ini secara signifikan memperbesar dampak reputasi yang harus ditanggung oleh produsen, terlebih jika merek tersebut telah dikenal luas dan memiliki nilai kepercayaan tinggi di mata konsumen.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk memiliki strategi komunikasi krisis yang tidak hanya cepat dan responsif, tetapi juga transparan, terstruktur, serta berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Respons yang terlambat, ambigu, atau terkesan defensif dapat memicu spekulasi publik, memperburuk persepsi konsumen, dan dalam jangka panjang merusak kredibilitas yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kepercayaan konsumen adalah aset yang sangat berharga, dan dalam konteks krisis pangan, kepercayaan tersebut dapat runtuh hanya karena kelalaian dalam menyampaikan klarifikasi atau pembelaan yang meyakinkan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu regulasi dan keamanan pangan tidak lagi dapat bersifat reaktif atau hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul. Sebaliknya, produsen harus mengadopsi pendekatan yang preventif, antisipatif, dan adaptif terhadap dinamika standar global yang terus berkembang. Ini mencakup penguatan sistem pengawasan mutu internal, pemantauan proaktif terhadap regulasi internasional, peningkatan kapasitas dalam manajemen risiko, serta pembangunan mekanisme komunikasi krisis yang siap diaktifkan kapan saja. Hanya dengan kesiapan yang menyeluruh dan mindset yang terbuka terhadap perubahan regulasi lintas negara, perusahaan dapat bertahan dan menjaga keberlanjutan operasional serta reputasi merek di pasar global yang semakin kompetitif dan sensitif terhadap isu keamanan pangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perbedaan regulasi keamanan pangan antara Taiwan, Malaysia, dan Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan penarikan produk Indomie rasa ayam spesial di pasar internasional. Meskipun produk Indomie telah memenuhi standar keamanan nasional Indonesia dan standar internasional Codex Alimentarius, ketidaksesuaian dengan regulasi lokal di Taiwan dan Malaysia menyebabkan penarikan produk tersebut. Kasus ini menegaskan pentingnya perusahaan ekspor pangan untuk memahami dan mematuhi regulasi keamanan pangan yang berlaku di setiap negara tujuan ekspor secara spesifik.

Penelitian ini menyoroti bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab etika bisnis perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan di pasar global. Strategi komunikasi krisis yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan untuk mengelola dampak negatif dari penarikan produk. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan perlunya manajemen kepatuhan regulasi yang adaptif dan strategi pemasaran global yang sensitif terhadap perbedaan regulasi untuk menjaga keberlanjutan ekspor produk pangan Indonesia di pasar internasional.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang mampu mengantisipasi risiko regulasi lintas negara serta memperkuat posisi produk pangan Indonesia di pasar global. Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional, serta memperkuat diplomasi teknis dalam forum-forum perdagangan global. Langkah ini penting untuk meminimalkan hambatan non-tarif yang dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri dan menghambat ekspansi pasar ekspor. Selain itu, temuan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, industri, dan akademisi dalam membangun sistem pemantauan regulasi global, serta menyusun peta jalan penguatan daya saing produk pangan Indonesia di pasar internasional.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meningkatkan keselarasan aturan pangan nasional dengan standar internasional yang berlaku di negara tujuan ekspor. Langkah ini penting untuk mengurangi kemungkinan penarikan produk karena ketidakcocokan dengan regulasi. Selain itu, produsen Mie instan perlu memperkuat sistem pengawasan mutu internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan global melalui proses sertifikasi dan pengujian di laboratorium yang diakui internasional. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), meningkatkan keselarasan aturan pangan nasional dengan standar internasional yang berlaku di negara tujuan ekspor. Langkah ini penting untuk mengurangi kemungkinan penarikan produk karena ketidakcocokan dengan regulasi. Produsen Mie instan perlu memperkuat sistem pengawasan mutu internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan global melalui proses sertifikasi dan pengujian di laboratorium yang diakui internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Panggabean, F. L., Fardiaz, D., & Purnomo, E. H. (2016). Regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dan kesenjangannya dengan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN. *Jurnal Mutu Pangan*, 3(2), 145-152. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/download/26267/pdf/>
- Anrina, F., & Pramahayekti, G. (2023). Ketentuan Senyawa Etilen Oksida dan Turunannya di Negara Mitra Dagang dan Strategi Menjaga Akses Pasar Ekspor Produk Pangan Indonesia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 46-60. <https://jurnal.kemendag.go.id/index.php/JCN/article/download/837/394>
- Smaralaksmi, N., & Prabowo, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Informasi Kandungan Zat Etilen Oksida pada Mie Instan Indomie. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*, (hlm. 37-42). <https://journal.uir.ac.id/psha/article/download/33479/16533/109817>

- Hermansah, D. (2022). Penerapan etika bisnis syariah pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) kuliner di Kecamatan Lubukraja, Kabupaten OKU (Skripsi sarjana). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. <http://repository.radenfatah.ac.id/20246/2/2.pdf>
- Fatmawatie, N. (2017). Tanggung jawab sosial perusahaan. STAIN Kediri Press.
- Lubis, R. E. (2010). Makalah PBL Blok 2 Modul 1: Penarikan Indomie oleh Taiwan. Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana.
- Awalia, M. O., & Komsiah, S. (2024). Analisis manajemen krisis: Studi kasus pada PT Indofood Indonesia Indomie. *Ikraith-Humaniora*, 8(2), 488–500.
- Codex Alimentarius. (n.d.). International food standards. Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian (Studi kasus konsumen Indomie di Sidoarjo). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara (JMD)*, 4(1), 21–26. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/issue/view/754>
- Martha, N. M. A. A., Putri, D. G. W. P., Devitayanti, N. P. A., Maharani, N. P. A., & Cesiariantara, N. L. Y. (2020). Analisis kasus bisnis: Penarikan peredaran Indomie di Taiwan [Makalah, Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Perpajakan]. <https://www.scribd.com/document/499260900/Kelompok-2-Kasus-Bisnis?v=0.614>
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan keamanan pangan. *Law, Development & Justice Review*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.36379>
- Putri, D. F., & Yuliani. (2023). Implikasi etika bisnis dalam perdagangan internasional: Tinjauan terhadap kegiatan ekspor dan impor. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 13*(2), 119–130. <https://doi.org/10.55606/jurnilmbik.v13i2.457>
- Lovinna, A. (2010). Motivasi Taiwan melarang impor produk Indomie asal Indonesia pada tahun 2010 (Skripsi Sarjana, Universitas Riau). Universitas Riau. <https://www.neliti.com/publications/32468/motivasi-taiwan-melarang-impor-produk-indomie-asal-indonesia-pada-tahun-2010>
- Mintari, N., Manalu, L., Asbari, M., Nofiyanti, D., Ayunita, D., Rizka, A., & Kimas, T. (2023). Komunikasi krisis dan pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen: Studi pada krisis produk mie instan Indofood (2023). *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jismab/article/view/173/65>
- Aninna, F., & Pramahayetki, G. (2023). Ketentuan senyawa etilen oksida dan turunannya di negara mitra dagang dan strategi menjaga akses pasar ekspor produk pangan Indonesia. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 1(10), 1–15. <https://kudagang.kemendag.go.id/repo/id/eprint/16/1/837-Article%20Text-5409-1-10-20230810.pdf>
- Amelia, N. Y., Supriyo, E., & Kusumayanti, H. (2024). Analisa kandungan senyawa etilen oksida dalam mi instan dengan menggunakan APCI-MS (Atmospheric Pressure Chemical Ionization – Mass Spectrometry). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 15392–15405. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14945/10030>
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- CNBC Indonesia. (2023, April 27). Taiwan tarik Indomie: Motif kesehatan atau persaingan dagang? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230427092013-33-432619/taiwan-tarik-indomie-motif-kesehatan-atau-persaingan-dagang>

- Detik.com. (2023, April 27). Indofood tanggap penarikan Indomie di Taiwan. <https://news.detik.com/berita/d-1460954/indofood-tanggapi-penarikan-indomie-di-taiwan>
- Detik.com. (2010, Oktober 9). Pengawet di Indomie legal, motif penarikan oleh Taiwan dipertanyakan. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-1461606/pengawet-di-indomie-legal-motif-penarikan-oleh-taiwan-dipertanyakan>
- CNN Indonesia. (2023, April 27). Gaduh Indomie ditarik di Taiwan, BPOM pastikan masih aman dikonsumsi. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230427163252-20-942732/gaduh-indomie-ditarik-di-taiwan-bpom-pastikan-masih-aman-dikonsumsi>
- CNBC Indonesia. (2023, April 28). Taiwan & Malaysia tarik Indomie, Indofood tegas bilang ini. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230428131219-4-433051/taiwan-malaysia-tarik-indomie-indofood-tegas-bilang-ini>
- BBC News Indonesia. (2023, April 27). Mi instan Indomie ditarik dari peredaran di Taiwan, ini temuan dan penjelasan BPOM. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqv02nn13d2o>
- Kontan.co.id. (2023, April 28). Malaysia tarik Indomie rasa ayam spesial dari pasaran. Kontan. <https://industri.kontan.co.id/news/malaysia-tarik-indomie-rasa-ayam-spesial-dari-pasaran>